



PENDAPAT AKHIR MINI

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

**Disampaikan Oleh : M. SARMUJI,SE,M.si
Anggota DPR-RI Nomor : A- 318
Daerah Pemilihan : JAWA TIMUR VI**

Jakarta, 17 Januari 2022



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

Dibacakan Oleh : M. SARMUJI, SE, M.Si
Nomor Anggota : A-318
Daerah Pemilihan : Jawa Timur VI

***Yang Terhormat Pimpinan Panitia Khusus (PANSUS) RUU Tentang IBU
KOTA NEGARA***

Yang Terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Yang Terhormat Menteri/Kepala Bappenas RI

Yang Terhormat Menteri Keuangan RI

Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri RI

Yang Terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang RI

Yang Terhormat, Anggota PANSUS, dan Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai GOLKAR terhadap hasil pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-undang Tentang Ibu Kota Negara.

Pimpinan PANSUS dan Hadirin yang kami hormati,

Ibu Kota Negara merupakan cerminan wajah suatu bangsa. Untuk itu, memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan tentang tata kelola Ibu Kota Negara harus mencerminkan identitas bangsa, Pancasila, Undang-undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Ibu kota juga harus bisa menjamin keberlangsungan ekonomi sosial budaya dan lingkungan, dan dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Fraksi Partai GOLKAR merespon positif rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Dalam pandangan kami, pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah *mindset* pembangunan dari *Jawa Centris* menjadi *Indonesia Centris* dan dapat meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif.

Pimpinan PANSUS dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah melalui pembahasan yang seksama dalam rapat-rapat Pansus, kami menilai bahwasannya RUU tentang Ibu Kota Negara dapat segera disahkan menjadi UU. Namun demikian, Fraksi Partai GOLKAR juga memiliki beberapa catatan penting terhadap RUU ini serta implemnetasinya nanti di lapangan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan bahwa persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara harus dilaksanakan dengan seksama dengan mempertimbangkan mitigasi risiko seperti pada pengadaan lahan, aspek lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
2. Penetapan wilayah IKN harus jelas dan pasti tidak hanya dari sisi batas teritorial, akan tetapi juga meghormati hak hidup masyarakat sekitar dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya.

bimbingan dan petunjuk, serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam ikhtiar untuk terus berkarya dan mengabdikan bagi bangsa dan negara.

Wa Billahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 Januari 2022

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



H. KAHAR MUZAKIR
KETUA



Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum
SEKRETARIS